

**Pedoman
Penguatan Pendidikan Karakter
Pada Pendidikan Anak Usia Dini**

Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Anak Usia Dini

Penasihat	Harris Iskandar
Penanggung Jawab	Muhammad Hasbi
Pengarah Materi	Maryana, Ngasmawi, Lestari Koesoemawardhani
Penyusun	Muhammad Hasbi, Maryana, Nanik Suwaryani, Doni Koesoema Albertus, Aria Ahmad Mangunwibawa, Anne Gracia, Padlia Parakasi, Sumarti M. Taher, Tulus Winarsunu, Luci RM Royanto, Lara Fridani, Rizki Muhammad Ramdhan, Evita Adnan
Editor	Nanik Suwaryani, Padlia Parakasi, Aria Ahmad Mangunwibawa, Jakino, Ari Susanto, Azhari Dasman Darnis, Setyo Untoro
Desain Sampul dan Tata Letak	M. Firdaus Jubaedi
Ilustrator	Silvi Pratiwi, Putra Rahmadhani
Sekretariat	Meylina, Hafidz, Imam Rohadi, Beryana Evridawati, Adrianto, Suci Sugeng Setyono, Agus Wahyu, Nugrahaini, Deni W. Utama, Samijah

Diterbitkan Oleh



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini**

ISBN : 978-602-6964-25-0

Cetakan Pertama 2019
Cetakan Kedua 2020

Kata Pengantar

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada hakikatnya adalah taman persemaian karakter bangsa yang dilakukan melalui keteladanan dan pembiasaan. Mendikbud Nadiem Makarim dalam acara Milad ke-107 Muhammadiyah menyampaikan, “Banyak orang tidak memahami betapa pentingnya peran PAUD dalam pengembangan karakter. Padahal dari situlah masa-masa emas untuk membentuk pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia seharusnya dimulai. Indonesia tidak akan maju tanpa PAUD yang baik”. PAUD yang baik dan berkualitas memiliki peran sentral dalam membentuk pemimpin masa depan yang unggul, serta menyiapkan Generasi Emas 2045 yaitu generasi yang berkarakter baik, berpengetahuan, dan memiliki keterampilan yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dilaksanakan dengan mengajak orang tua dan masyarakat bekerja bersama untuk mendukung anak-anak kita menghadapi masa depan yang semakin menantang. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter mendorong seluruh satuan pendidikan untuk mengembangkan jejaring tripusat pendidikan dengan membumikan Pancasila melalui pembiasaan nilai-nilai utama PPK yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas sesuai dengan visi-misi, kearifan lokal dan kreativitas satuan PAUD masing-masing.

Buku ini merupakan rujukan bagi satuan PAUD dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan PPK. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas hadirnya buku ini dan berharap PPK dapat terlaksana dengan dukungan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, orang tua, dan masyarakat.

Semoga semakin banyak satuan PAUD yang memiliki komitmen dan inisiatif dalam menggerakkan PPK dalam rangka mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berjiwa Pancasila, cerdas, berkarakter, tangguh, dan berdaya saing.

Jakarta, Desember 2019

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat



Harris Iskandar

NIP 196204291986011001

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	7
C. Tujuan PPK	8
D. Nilai-nilai Utama Karakter	8
E. Prinsip-prinsip Pengembangan dan Implementasi PPK	15
F. Konsep-konsep Dasar PPK	16
2. Tata Kelola dan Daya Dukung	17
A. Tata Kelola Gerakan PPK	18
B. Sarana dan Prasarana	18
C. Pembiayaan	19
D. Pelaksana dan Pemangku Kepentingan PPK	19
E. Pengembangan SDM PPK	21
3. Implementasi PPK	25
A. Pendekatan PPK Berbasis Kelas (Lingkungan Kegiatan)	27
B. Pendekatan PPK Berbasis Budaya Satuan PAUD	28
C. Pendekatan PPK Berbasis Keluarga dan Masyarakat	30
4. Pendampingan	32
A. Konsep dan Tujuan Pendampingan	33
B. Sasaran Pendampingan	33
5. Penilaian dan Evaluasi Program	35
A. Penilaian PPK	36
B. Evaluasi Program	39
6. Referensi	42

1

Pendahuluan

- A** Latar Belakang
- B** Dasar Hukum
- C** Tujuan PPK
- D** Nilai-nilai Utama Karakter
- E** Prinsip-prinsip Pengembangan dan Implementasi PPK
- F** Konsep-konsep Dasar PPK



A Latar Belakang

Pendidikan karakter di satuan pendidikan, termasuk satuan PAUD, bukanlah hal yang baru. Semua satuan pendidikan telah melaksanakannya sampai tingkat tertentu. Namun terdapat sejumlah faktor yang menuntut adanya penguatan pendidikan karakter. Berikut adalah beberapa faktor yang melatarbelakangi gerakan penguatan pendidikan karakter (PPK).

Keterampilan Abad 21

Tuntutan dunia abad ke-21 berbeda secara signifikan dengan abad sebelumnya. Perubahan yang terjadi antara lain berkenaan dengan berlangsungnya revolusi digital yang mengubah kehidupan manusia. Pola komunikasi menjadi berubah karena pola pergerakan manusia yang semakin tinggi, serta teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin berkembang. Perubahan dunia yang cepat juga mengakibatkan dunia tampak berlari tunggang-langgang, ruang tampak menyempit, waktu terasa ringkas, dan keusangan segala sesuatu cepat terjadi.

Informasi yang semakin banyak dan beragam menyebabkan tumbuhnya masyarakat padat pengetahuan (*knowledge society*), masyarakat informasi (*information society*), dan masyarakat jaringan (*network society*). Kondisi ini menjadikan pengetahuan, informasi, dan jaringan menjadi hal yang penting. Perubahan-perubahan di atas memunculkan tatanan, ukuran dan kebutuhan baru yang berbeda dengan sebelumnya, yang harus ditanggapi dan dipenuhi oleh dunia pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini.

Sejarah Penguatan Pendidikan Karakter

Berkaitan dengan keterampilan abad 21, Ki Hadjar Dewantara (1962), Bapak Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa “Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita” (Buku 1). Selanjutnya beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan harus memperkuat empat dimensi pengolahan karakter, yaitu olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Keempat dimensi ini merupakan bagian penting yang saling berkaitan dalam setiap proses pembelajaran.

Bahwa esensi pendidikan adalah penanaman dan penumbuhkembangan karakter ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Agar amanah dalam Undang-Undang itu bisa terlaksana sejumlah perundangan di bawahnya telah ditetapkan dan kebijakan serta program yang relevan telah dikembangkan dan dilaksanakan. Namun, tantangan pendidikan yang sedemikian besar menuntut upaya lebih terkait pendidikan karakter. Sebagai respons dari itu, Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa dicanangkan pada tahun 2010. Lebih jauh lagi, pada tahun 2013 ditetapkan kebijakan baru terkait kurikulum yang mewajibkan semua guru pada semua kelas dan mata pelajaran untuk ikut bertanggung jawab dalam pengembangan karakter anak.

Kesadaran bahwa pembentukan karakter anak tidak bisa dilakukan sendiri oleh satuan pendidikan, mendorong gerakan penguatan kemitraan trisentra pendidikan (satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat) yang dimulai sejak tahun 2015. Ini juga menjadi bagian integral Nawacita yang melahirkan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014. Gerakan ini selanjutnya semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam Perpres ini diatur bahwa PPK dilakukan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pentingnya upaya menciptakan sumber daya manusia melalui pendidikan karakter diulangi lagi oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019 di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat beliau menyampaikan bahwa prioritas dalam menciptakan SDM unggul adalah melalui pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila, deregulasi dan debirokratisasi, meningkatkan investasi dan inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan teknologi.

Relevansi PPK pada PAUD

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Pasal 1).

Bentuk satuan PAUD melalui jalur pendidikan formal adalah Taman Kanak-kanak (TK), jalur nonformal adalah Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan jalur pendidikan informal dilakukan di keluarga dan lingkungan (masyarakat).

PAUD memberikan dasar untuk semua aspek perkembangan individu yaitu agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni (Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD). Sedangkan dalam struktur kurikulum PAUD, upaya pencapaian standar tersebut digambarkan dalam bentuk kompetensi inti sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan (Permendikbud No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD 2013). Dalam proses pembelajaran hampir semua materi kompetensi dasar dilaksanakan dengan mengintegrasikan ke enam aspek perkembangan. Keterpaduan dalam proses pembelajaran (melalui bermain) pada hampir semua materi itu mengarah pada pembentukan karakter anak.

Karakter juga bisa dipandang dari beberapa sisi. Thomas Lickona (1991) melihat ada tiga aspek penting yang saling berhubungan, yaitu pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Peristiwa seorang anak membuang sampah pada tempatnya merupakan contoh aspek pengetahuan yang muncul pada pikiran bahwa ia harus menjaga kebersihan lingkungan (*moral knowing*). Ketika anak melakukan proses ini, anak mengalami perasaan bahagia (*moral feeling*), dan saat tindakan berlangsung berarti terjadi proses perilaku moral (*moral behavior*).

Sementara itu, Howard Gardner (2000) dengan teori kecerdasan majemuk menekankan perlunya stimulasi pada semua bagian otak yang mendorong berkembangnya berbagai kecerdasan itu. Beragam jenis kecerdasan itu meliputi

kecerdasan linguistik, matematis-logis, visual, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Dengan teori ini, sangat tidak diinginkan seseorang yang sangat cerdas dalam matematika, musik, atau lainnya tanpa memiliki kecerdasan interpersonal dan intrapersonal yang merupakan dimensi karakter.

Pentingnya pendidikan karakter, juga diakui secara global melalui lima pilar yang dipromosikan oleh UNESCO. Kelima pilar itu adalah belajar untuk mengetahui (*learning to know*), belajar untuk melakukan (*learning to do*), belajar untuk hidup bersama (*learning to live together*), belajar untuk menjadi (*learning to be*), dan belajar untuk mengubah diri dan memperbaiki tatanan masyarakat (*learning to transform for oneself and society*).

Karena tuntutan keterampilan abad 21 yang didukung oleh kemauan politik serta sejumlah teori perkembangan, penanaman dan penumbuhkembangan karakter pada anak usia dini secara sadar sangat perlu dilakukan. Masa usia dini merupakan momentum saat anak sangat mudah dan cepat belajar karena memiliki *absorbent mind* (pikiran yang mudah menyerap) (Montessori, 2002). Namun, karena pada masa usia itu anak masih pada tahap meniru maka pola asuh dengan keteladanan dan pembiasaan yang dilakukan dan dikondisikan oleh orang-orang dewasa di sekitarnya sangatlah penting, baik di keluarga, satuan PAUD, maupun di masyarakat. Dari sisi neurosains, pola asuh yang tepat akan menyumbang proses pematangan koneksi saraf untuk perkembangan anak disamping faktor-faktor lain yaitu proses kehamilan, proses lahir, dan genetik (Santrock, 2014).

Pentingnya pola asuh yang tepat pada anak-anak usia dini sayangnya tidak disadari oleh banyak orang dewasa di sekitar mereka, baik di keluarga, satuan PAUD, maupun di masyarakat.

Pendidikan karakter di keluarga

Di keluarga, setiap orang tua hampir dipastikan sangat mendambakan anak yang mandiri, disiplin, dan berperilaku baik lainnya. Namun sangat mudah sekali ditemui orang tua yang tidak menunjukkan perilaku yang mampu memberi contoh tentang nilai-nilai itu. Sebagai contoh, banyak orang tua yang mengantarkan anaknya ke satuan PAUD dengan naik motor tanpa mengenakan helm. Selain itu, banyak dari mereka tanpa sadar menjauhkan anak dari sifat mandiri dengan membawakan tas anak mereka, selalu menyuapi makan, dan menuruti yang

diinginkan anak. Selain kontradiksi itu, banyak anak usia dini yang tidak terlepas dari masalah yang dihadapi keluarga saat ini yang sedikit banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan global dalam semua sendi kehidupan. Penggunaan teknologi informasi yang semakin canggih membuat anak-anak sejak usia dini terpapar banyak hal dari berbagai media. Hal ini berpengaruh pada diri anak, misalnya anak memperoleh informasi yang terkadang kurang sesuai dengan kebutuhan dan usia perkembangannya, anak menjadi kurang fokus, kurang sabar, dan kurang melatih motoriknya.

Pola komunikasi dalam keluarga pun berubah akibat kesibukan orang tua yang tinggi. Anak menjadi kurang memiliki kelekatan (*attachment*) dan kurang merasakan sentuhan. Dampak modernisasi sangat terasa di keluarga, misalnya orang tua semakin tidak memiliki waktu yang memadai untuk menemani bermain, membacakan cerita sebelum tidur, serta membimbing dalam kegiatan sehari-hari seperti sikat gigi, membersihkan diri, dan makan. Selain itu, orang tua kerap kurang sabar dalam menghadapi berbagai perilaku anak dan bahkan sebagian melakukan kekerasan pada mereka.

Pendidikan Karakter di Satuan PAUD

Kurikulum 2013 PAUD menuntut guru (di satuan PAUD formal) dan pendidik (di satuan pendidikan non formal) untuk mampu mengintegrasikan penanaman dan penumbuhkembangan karakter dalam beragam kegiatan sesuai dengan tema dan sub tema yang mereka tetapkan. Namun, sumber daya manusia yang dimiliki PAUD yang sebagian besar diselenggarakan oleh lembaga di masyarakat, sangat beragam dengan dominasi guru/pendidik berkompotensi rendah.

Keterbatasan sumber belajar baik untuk guru dan pendidik, orang tua, dan anak juga merupakan faktor yang menyumbang pendidikan karakter yang kurang optimal. Selain itu, kemauan orang tua yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembelajaran untuk anak usia dini sering kali dituruti oleh guru atau pendidik karena ketidakmampuan mereka untuk merespons secara tepat.

Pendidikan Karakter di Masyarakat

Saat ini nilai-nilai dalam masyarakat yang berubah dan semakin terbuka menyebabkan perubahan dalam diri anak. Secara tidak disadari anak terpapar oleh berbagai informasi yang belum tentu baik, benar, dan bermanfaat bagi perkembangan mereka.

Kekerasan, ucapan kasar, dan perundungan (*bullying*) yang ditonton di TV, dilihat, atau juga dialami langsung baik di dalam dan luar rumah, termasuk di satuan PAUD, dapat memberi pesan negatif pada anak. Dengan mudah mereka meniru dan mengikuti perilaku itu. Ini tidak akan terjadi jika orang tua dan guru/pendidik menerapkan pola pengasuhan yang melatih anak untuk mulai mengenal benar dan salah, serta memberi teladan dan membiasakan perilaku baik.

PPK yang melibatkan kemitraan trisentra pendidikan menjadi pilihan yang tidak bisa tidak harus dilakukan mengingat besarnya biaya sosial yang akan hilang jika itu tidak dilakukan. Seperti yang ditemukan oleh James Heckman (2012) bahwa menanamkan investasi pada PAUD yang berkualitas akan berkontribusi pada kesejahteraan yang jauh lebih besar dibanding investasi pada jenjang pendidikan lainnya.

B Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
5. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

C Tujuan PPK

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
2. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
3. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

D Nilai-Nilai Utama Karakter

Gerakan PPK menempatkan nilai karakter pada pendidikan yang membudayakan dan memberadatkan para pelaku pendidikan (guru/pendidik, tenaga kependidikan, keluarga/orang tua, dan masyarakat).

Terdapat lima nilai utama karakter yang ditekankan pada gerakan ini (Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018). Masing-masing dari kelima nilai utama karakter bangsa beserta banyak subnilainya tidaklah berdiri sendiri tapi saling berkaitan. Berikut ini beberapa subnilai dari kelima nilai utama itu yang merujuk di antaranya dari Kompetensi Dasar yang ada pada Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, serta penerapan dalam Pedoman Penanaman Sikap Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018 adalah sebagai berikut.



1. Religiositas

Nilai religiositas mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, serta hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain.

Subnilai religiositas pada anak usia dini antara lain, beriman dan bertaqwa, cinta damai, toleran, menghargai perbedaan, teguh pendirian, percaya diri, mau bekerja sama, kasih sayang, bersahabat, tulus, menghargai pendapat orang lain, mencintai lingkungan, hidup bersih, sehat, dan melindungi yang kecil dan tersisih.



2. Nasionalisme

Nilai nasionalisme merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Subnilai nasionalisme pada anak usia dini antara lain, cinta tanah air, mengikuti aturan, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama menghargai diri sendiri (contoh: merawat diri agar sehat dan kuat), menghargai orang lain (termasuk kepada mereka yang berbeda), peduli lingkungan, bangga pada budaya bangsa sendiri (termasuk bahasa, pakaian, dan tata krama), rela berkorban (contoh: bersedia meminjamkan mainan kepada teman), unggul, dan berprestasi.



3. Kemandirian

Nilai kemandirian merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain serta mempergunakan segala tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita.

Subnilai kemandirian pada anak usia dini antara lain, tekun bekerja, sikap tangguh dan daya juang, mengikuti aturan, mengembangkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan keberanian.



4. Gotong Royong

Nilai gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Subnilai gotong royong pada anak usia dini antara lain, memiliki sikap peduli, menghargai karya diri dan orang lain, menghargai kesepakatan bersama, bekerja sama, membiasakan musyawarah, mufakat, dan diskusi, tolong-menolong, mengembangkan sikap solidaritas, berempati, anti diskriminasi, anti kekerasan, kesetiakawanan, dan sikap kerelawanan.



5. Integritas

Nilai integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang berlandaskan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan serta memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral).

Subnilai integritas pada anak usia dini antara lain, tanggung jawab sebagai warga negara, antikorupsi, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, komitmen moral melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran, kesabaran dan keteraturan (seperti antre), kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, memenuhi janji, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai teman, termasuk mereka yang berbeda (misalnya yang memiliki disabilitas).

Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang baru, berdiri, dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan nilai yang sudah ada sebelumnya dan berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi.

Dari nilai utama mana pun pendidikan karakter dimulai, individu dan satuan PAUD perlu mengembangkan nilai-nilai utama lainnya, baik secara kontekstual maupun universal. Nilai religiositas sebagai cerminan dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan secara utuh dalam bentuk ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dan dalam bentuk kehidupan antarmanusia sebagai kelompok, masyarakat, maupun bangsa. Dalam kehidupan sebagai masyarakat dan bangsa, nilai-nilai religiositas tersebut melandasi dan melebur di dalam nilai-nilai utama nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Demikian pula, jika nilai utama nasionalisme dipakai sebagai titik awal penanaman nilai-nilai karakter, nilai ini harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang tumbuh bersama nilai-nilai lainnya.



E Prinsip-Prinsip Pengembangan dan Implementasi PPK

PPK dikembangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
2. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
3. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.



F Konsep-Konsep Dasar PPK

Penguatan Pendidikan Karakter merupakan gerakan pendidikan di lembaga pendidikan anak usia dini untuk memperkuat karakter melalui proses pemodelan, pembiasaan, pembentukan, transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik) sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Untuk itu, diperlukan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara satuan PAUD, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Strategi implementasi PPK di satuan PAUD dilakukan terintegrasi di semua kegiatan berikut ini.

1. Kegiatan harian adalah kegiatan yang dilakukan guru dan pendidik di satuan PAUD secara teratur dan terjadwal, yang diikuti oleh setiap anak didik. Program terintegrasi mulai dari penyambutan, kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sesuai dengan pendekatan yang dipilih (sentra, area, sudut, atau kelompok dan lain lain).
2. Kegiatan pendukung adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan pendukung dapat berupa puncak tema, *field trip* (kunjungan edukasi), serta kegiatan kekhasan satuan PAUD yang diprogramkan untuk seluruh peserta didik seperti bakti sosial.
3. Kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan PAUD atau orang tua yang ditujukan untuk pengembangan kompetensi personal dan sosial sesuai minat dan bakat. Contoh dari kegiatan itu misalnya menari, mengolah vokal, melukis, menghafal Al-quran, kelompok sains, dan berenang.

2

Tata Kelola dan Daya Dukung

- A** Tata Kelola Gerakan PPK
- B** Sarana dan Prasarana
- C** Pembiayaan
- D** Pelaksana dan Pemangku Kepentingan PPK
- E** Pengembangan SDM PPK



A Tata Kelola Gerakan PPK

Pengelolaan Gerakan PPK merupakan mekanisme koordinasi seluruh pemangku kepentingan atau ekosistem pendidikan yang terkait dengan penyelenggaraan PPK. Seluruh pelaku membentuk jejaring dan kolaborasi secara terintegrasi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan kabupaten/ kota memegang peranan penting dalam mendampingi, membina, dan mengarahkan satuan PAUD dalam pelaksanaan PPK. Kepala satuan PAUD sebagai pengelola satuan PAUD bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya pendidikan untuk melaksanakan PPK secara holistik, integratif dan kolaboratif, sebagaimana dibahas berikut ini.

1. **Holistik** adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang meliputi pendidikan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan.
2. **Integratif** adalah pelaksana pembelajaran dengan cara mengintegrasikan pengembangan karakter dengan substansi enam aspek pengembangan yang terdapat dalam kurikulum, sesuai dengan tahapan perkembangan anak secara kontekstual. Kontekstual yang dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan memanfaatkan kearifan lokal.
3. **Kolaboratif** adalah proses pembelajaran melibatkan berbagai pihak sesuai dengan kepakarannya, kebutuhan lembaga dan kondisi lembaga, dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti orang tua, tokoh masyarakat, Puskesmas, kantor polisi, pemadam kebakaran, komunitas dan organisasi pendidikan seperti komunitas dongeng, komunitas literasi, serta taman bacaan masyarakat.

B Sarana dan Prasarana

Satuan PAUD menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mendukung pelaksanaan gerakan PPK secara utuh dan menyeluruh. Penyediaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan nilai PPK yang

akan diprioritaskan oleh satuan PAUD. Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan PPK dapat dilakukan dengan melibatkan orang tua dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan PAUD yang perlu dikembangkan. Adapun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh satuan PAUD idealnya dapat menunjang kegiatan PPK namun tidak menutup kemungkinan dapat menggunakan fasilitas yang berada di lingkungan sekitar PAUD, misalnya tempat olahraga, perpustakaan, dan kesenian.

C Pembiayaan

Gerakan PPK mestinya tidak memerlukan biaya tambahan. Namun ketika dana tambahan diperlukan, bisa ditanggung secara gotong royong, terutama oleh orang tua anak. Satuan PAUD dapat juga bermitra dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang program-programnya menasar ke anak usia dini sehingga bisa meminimalkan biaya. Sebagai contoh, perguruan tinggi mempunyai program pengabdian masyarakat dan magang, Puskesmas dengan program Sekolah Sehat dan pencegahan *stunting*, dan polisi yang mempunyai program Polisi Sahabat Anak, Komunitas dan organisasi yang memiliki kegiatan kreatif terkait budaya literasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi anak dan guru. Selain itu, kemitraan juga bisa dibangun dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) melalui gerakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta individu-individu yang mempunyai perhatian pada PAUD.

Sumber-sumber pembiayaan satuan PAUD untuk PPK baik yang berasal dari dana yang biasa diterima maupun khusus untuk PPK yang berasal dari pemerintah, masyarakat ataupun orang tua perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memperhatikan peraturan-peraturan terkait dengan sumbangan pendidikan yang berlaku.

D Pelaksana dan Pemangku Kepentingan PPK

Pelaksanaan gerakan PPK yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya sampai dengan satuan PAUD dapat melibatkan berbagai pelaksana dan pemangku kepentingan pendidikan berdasarkan kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing. Fungsi dan peranan masing-masing pihak dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Membuat peraturan tentang pelaksanaan gerakan PPK
- b. Menyusun kebijakan pelaksanaan gerakan PPK
- c. Melakukan sinergi dan implementasi kebijakan gerakan PPK dengan kementerian/lembaga terkait lainnya
- d. Menyusun dan mengembangkan materi PPK
- e. Melakukan sosialisasi dan menumbuhkan inisiasi pelaksanaan gerakan PPK
- f. Melaksanakan pengembangan SDM PPK
- g. Memberikan pendampingan pelaksanaan gerakan PPK
- h. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan gerakan PPK

2. Dinas Pendidikan Provinsi

- a. Melaksanakan koordinasi dengan UPT Kemendikbud yang menangani PAUD
- b. Melakukan sinergi dan implementasi kebijakan gerakan PPK dengan dinas terkait di tingkat provinsi
- c. Memberikan dukungan pelaksanaan gerakan PPK
- d. Memberikan pendampingan pelaksanaan gerakan PPK
- e. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan gerakan PPK

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- a. Melaksanakan koordinasi implementasi pelaksanaan gerakan PPK dengan UPT Kemendikbud yang menangani PAUD dan satuan PAUD
- b. Melakukan sinergi dan implementasi kebijakan gerakan PPK dengan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota
- c. Memberikan dukungan pelaksanaan gerakan PPK pada satuan PAUD
- d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana gerakan PPK pada satuan PAUD
- e. Memberikan pendampingan pelaksanaan gerakan PPK pada satuan PAUD
- f. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan gerakan PPK di satuan PAUD.

4. Pengawas/Penilik Satuan PAUD

- a. Memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas satuan PAUD sebagai perwujudan dari pelaksanaan gerakan PPK
- b. Mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai potensi/ keunggulan satuan PAUD binaan dalam implementasi PPK

- c. Memetakan penjenamaan implementasi PPK di satuan PAUD binaan untuk dijadikan rujukan bagi satuan PAUD binaan lain
- d. Mendampingi dan mendukung kepala satuan PAUD, guru/pendidik, dan peserta didik untuk mengimplementasikan nilai-nilai PPK sesuai dengan penjenamaan (*school branding*) satuan PAUD
- e. Mengevaluasi implementasi PPK di satuan PAUD binaan
- f. Mendampingi penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi implementasi PPK di satuan PAUD binaan
- g. Membantu menjelaskan secara komprehensif kepada pihak terkait/komunitas satuan PAUD tentang konsep, tujuan, dan manfaat PPK
- h. Memastikan PPK diterapkan secara utuh dan menyeluruh

5. Satuan PAUD

- a. Kepala/Pengelola Satuan PAUD
 - 1. Memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas satuan PAUD sebagai perwujudan dari pelaksanaan gerakan PPK
 - 1. Melaksanakan koordinasi dengan UPT Kemendikbud yang menangani PAUD
 - 2. Melakukan sinergi dan implementasi kebijakan gerakan PPK dengan dinas terkait di tingkat provinsi
 - 3. Memberikan dukungan pelaksanaan gerakan PPK
 - 4. Memberikan pendampingan pelaksanaan gerakan PPK
 - 5. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan gerakan PPK
- b. Guru/Pendidik
 - 1. Memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas satuan PAUD sebagai perwujudan dari pelaksanaan gerakan PPK
 - 2. Melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK
 - 3. Menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif
 - 4. Mendukung terbentuknya relasi yang baik antarpendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas satuan PAUD di dalam maupun di luar lingkungan kegiatan
 - 5. Membangun lingkungan belajar yang mengapresiasi dan menghargai keunikan individu

6. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan gerakan PPK
- c. Tenaga Kependidikan
 1. Memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas satuan PAUD sebagai perwujudan dari pelaksanaan gerakan PPK
 2. Mendukung terbentuknya relasi yang baik antartenenaga kependidikan, pendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas satuan PAUD di dalam lingkungan satuan PAUD
- d. Komite/Paguyuban Orang Tua/POMG di Satuan PAUD
 1. Memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas satuan PAUD sebagai perwujudan dari pelaksanaan gerakan PPK
 2. Mendukung pelaksanaan gerakan PPK secara mandiri dan gotong royong
 3. Mendukung dan terlibat dalam implementasi tiga basis pendekatan PPK.
 4. Mendukung pelaksanaan kebijakan lima hari satuan PAUD
 5. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan gerakan PPK
 6. Menciptakan suasana rumah yang kondusif dalam penanaman nilai-nilai karakter
 7. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan gerakan PPK

6. Media Massa (Cetak dan Elektronik)

- a. Memberikan sosialisasi dan informasi yang mendukung pelaksanaan gerakan PPK
- b. Mendukung kegiatan dan menyebarluaskan praktik-praktik baik gerakan PPK kepada masyarakat

7. Perguruan Tinggi

- a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis PPK
- b. Memberikan dukungan pada satuan PAUD sesuai dengan kompetensi masing-masing perguruan tinggi
- c. Menjalin kerja sama dengan satuan PAUD untuk peningkatan kualitas dan kapasitas pendidik dalam gerakan PPK

8. Alumni Satuan PAUD

- a. Menjadi mitra dan/atau relawan satuan PAUD dalam pelaksanaan gerakan PPK sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing.
- b. Memberikan dukungan pada satuan PAUD dalam pelaksanaan gerakan PPK.

E Pengembangan SDM PPK

Pelaksanaan program PPK perlu dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan oleh berbagai pihak terkait sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Untuk itu, perlu dilakukan upaya penyiapan dan pengembangan SDM PPK secara terencana dan terpadu. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM pendidikan adalah dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis. Komponen SDM yang diperlukan dalam PPK meliputi:

1. fasilitator pusat
2. fasilitator kabupaten/kota
3. pengawas dan penilik
4. kepala satuan PAUD
5. guru/pendidik, dan
6. Komite/Paguyuban Orang Tua/POMG satuan PAUD.

1. Mekanisme Pengembangan Kapasitas SDM

Pengembangan kapasitas SDM PPK dilakukan melalui sistem bimbingan teknis kepada fasilitator pusat dan fasilitator kabupaten/kota. Bimbingan teknis diberikan kepada pengawas dan penilik, kepala satuan PAUD, guru, dan komite/paguyuban orang tua/POMG satuan PAUD dengan mempertimbangkan aspek jumlah sasaran, luas wilayah, serta biaya yang tersedia.

2. Tugas Komponen Tim Pengembang Kapasitas SDM PPK

Setiap tim dalam komponen pengembangan memiliki tugas pokok berbeda sebagai bagian dari satu kesatuan pengembangan kapasitas SDM PPK, antara lain:

a. Fasilitator Pusat

Fasilitator pusat bertanggung jawab dalam:

1. melatih fasilitator di tingkat kabupaten/kota; dan
2. mendampingi fasilitator di tingkat kabupaten/kota pada saat melakukan pelatihan kepada pengawas/ penilik dan satuan PAUD (kepala satuan PAUD, guru/pendidik, komite/paguyuban orang tua/ POMG satuan PAUD).

b. Fasilitator Kabupaten/Kota

Fasilitator kabupaten/kota bertanggung jawab dalam:

1. pengembangan PPK di tingkat satuan PAUD di wilayahnya (dapat menjadi pelatih pada bimbingan teknis PPK di kabupaten/kota); dan
2. sebagai fasilitator kabupaten/kota dalam melatih pengembangan program PPK di luar kabupaten/kota domisili berdasarkan rekomendasi dari pusat.

3

Implementasi PPK

- A** Pendekatan PPK Berbasis Kelas (Lingkungan Kegiatan)
- B** Pendekatan PPK Berbasis Budaya Satuan PAUD
- C** Pendekatan PPK Berbasis Keluarga dan Masyarakat



Membentuk manusia Indonesia yang unggul perlu dilakukan pada tahap pendidikan sejak dini. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sejak dini dapat dimulai sejak anak bertumbuh dalam kandungan ibu, melalui pemberian gizi yang baik, serta pengasuhan di dalam keluarga, dan pembelajaran di dalam lingkungan masyarakat, mulai dari 0 tahun sampai 6 tahun sebelum peserta didik memasuki tahap pendidikan dasar secara formal.

PPK mengoptimalkan fungsi kemitraan Tripusat Pendidikan sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan, yaitu satuan PAUD, keluarga, dan masyarakat. Ini berarti bahwa para pelaku utama dalam Tripusat Pendidikan, yaitu guru, kepala satuan PAUD, staf, orang tua, dan masyarakat perlu bersinergi dalam mengembangkan PPK di satuan PAUD.

Gerakan PPK memiliki tiga basis pendekatan. Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan Tripusat Pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kelas (lingkungan kegiatan), budaya satuan PAUD, serta keluarga dan masyarakat.

Satuan PAUD memulai program PPK dengan melakukan asesmen awal. Proses asesmen atau penilaian dilakukan pada peserta didik untuk penyesuaian pemilihan nilai utama yang akan menjadi fokus dalam tahapan pengembangan pembentukan dan penguatan karakter di lingkungan mereka. Pemilihan nilai utama ini didiskusikan, dimusyawarahkan, dan didialogkan dengan seluruh pemangku kepentingan satuan PAUD (kepala satuan PAUD, guru/pendidik, tenaga kependidikan, Komite/Paguyuban Orang Tua/POMG satuan PAUD, dan peserta didik). Bersamaan dengan itu, dirumuskan pula sejumlah nilai pendukung yang dipilih dan relevan. Satuan PAUD mendeskripsikan bagaimana jalinan antarnilai utama tersebut, yaitu antarnilai utama yang dipilih dengan nilai pendukung. Seluruh pemangku kepentingan menyepakati nilai utama yang menjadi prioritas serta nilai pendukung, dan jalinan antarnilai dalam membentuk karakter warga satuan PAUD yang sekaligus tertuang dalam visi dan misi satuan PAUD.

Nilai utama yang dipilih oleh satuan PAUD menjadi fokus dalam rangka pengembangan budaya dan identitas satuan PAUD. Seluruh kegiatan, program, dan pengembangan karakter di lingkungan satuan PAUD berpusat pada nilai utama tersebut, dan berlaku bagi semua komunitas satuan PAUD. Penyusunan prioritas pengembangan nilai utama dalam masa belajar akan terintegrasi secara holistik.

Satuan PAUD menjabarkan nilai utama tersebut dalam indikator dan bentuk perilaku objektif yang bisa diamati dan diverifikasi. Dengan menentukan indikator, satuan PAUD dapat menumbuhkan nilai-nilai pendukung yang lain melalui fokus pengalaman komunitas satuan PAUD terhadap implementasi nilai itu.

Dari nilai utama dan nilai-nilai pendukung yang sudah disepakati dan ditetapkan, satuan PAUD bisa membuat *tagline* yang menjadi moto satuan PAUD tersebut sehingga menunjukkan keunikan, kekhasan, dan keunggulannya. Contoh: “Membentuk Calon Pemimpin Masa Depan”, “PAUD Cinta”, dan “PAUD Budaya”. Satuan PAUD dapat pula membuat logo satuan PAUD, himne, dan mars yang sesuai dengan penjenamaannya masing-masing.

A Pendekatan PPK Berbasis Kelas (Lingkungan Kegiatan)

Pendekatan PPK berbasis kelas atau lingkungan kegiatan dilakukan di antaranya dengan:

- a. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan mempertimbangkan kondisi daerah, satuan PAUD, dan karakteristik peserta didik;
- b. melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan KTSP yang disusun dan memastikan pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam tema/subtema pembelajaran;
- c. menentukan metode yang tepat, menciptakan suasana bermain yang kondusif, dan mengatur lingkungan kegiatan yang aman, nyaman, dan yang merangsang berbagai aspek perkembangan peserta didik;
- d. melibatkan orang tua dan/atau anggota masyarakat lainnya untuk menginspirasi dan memperkaya pemahaman peserta didik;
- e. memberikan dukungan sesuai karakteristik peserta didik, termasuk minat, bakat, dan kebutuhan khusus yang dimiliki;
- f. melakukan evaluasi pembelajaran.

Agar tidak menghabiskan banyak waktu namun bisa memberikan gambaran yang utuh tentang cara mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, dokumen KTSP disusun dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan singkat.

B Pendekatan PPK Berbasis Budaya Satuan PAUD

PPK berbasis budaya satuan PAUD dilaksanakan melalui pengembangan tata kelola satuan PAUD sehingga tercipta iklim dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan serta karakter anak. Selain itu, PPK berbasis budaya satuan PAUD merupakan upaya untuk menciptakan iklim dan lingkungan bermain/berkegiatan yang mendukung implementasi PPK dengan melibatkan seluruh warga satuan PAUD.

PPK berbasis budaya satuan PAUD berfokus pada pembiasaan dan pembentukan budaya yang merepresentasikan nilai-nilai utama PPK yang menjadi prioritas satuan PAUD. Satuan PAUD bisa memfokuskan pada satu nilai utama dalam program PPK. Karena antar nilai utama saling berkaitan, fokus pada satu nilai utama tidak akan menghilangkan atau mengabaikan pengembangan nilai-nilai utama yang lain.

Langkah-langkah pelaksanaan PPK berbasis budaya satuan PAUD, antara lain dengan cara menyusun dan mengimplementasikan aturan-aturan (termasuk Prosedur Operasional Standar) yang mendukung penumbuhkembangan karakter anak. Sebagai contoh, tanggung jawab, kepedulian, dan kemandirian bisa dibiasakan dengan peraturan tentang buang sampah, piket kebersihan, merawat tanaman, dan upaya guru/pendidik tentang penanganan permasalahan pada anak.

PPK berbasis budaya satuan PAUD dilakukan dengan cara:

- a. Pembiasaan untuk menanamkan nilai-nilai karakter melalui banyak kegiatan seperti contoh berikut.
 - membaca doa bersama
 - membacakan buku atau dongeng
 - menyanyikan lagu lagu nasional dan daerah
 - memberi kesempatan pada anak untuk memilih buku yang akan dibacakan atau 'dibaca' sendiri
 - melaksanakan upacara bendera
 - merapikan mainan yang digunakan
 - membersihkan alat dan meja makan
 - merayakan hari besar nasional dan keagamaan

- melakukan karya wisata
 - melaksanakan pentas seni dan karya anak
- b. Pembiasaan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) setiap hari
- Menerapkan nilai-nilai utama melalui pembiasaan dalam bentuk 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) setiap hari dalam interaksi antar pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik satuan PAUD
 - Mendorong orang tua atau pengasuh yang mengantar jemput anak untuk juga menerapkan 5S
 - Anak mengucapkan salam hormat kepada guru/pendidik secara bersama sebelum pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang siswa secara bergantian.
- c. Penjenamaan (*branding*) satuan PAUD (citra keunikan, kekhasan dan keunggulan)
- Penjenamaan satuan PAUD tercermin dari tampilan satuan PAUD, suasana, dan upaya menumbuhkan prestasi satuan PAUD. Contoh: PAUD Peduli, kelompok bermain lincah dan gesit.
 - Penjenamaan membangun citra positif satuan PAUD untuk meningkatkan dukungan orang tua dan masyarakat.
 - Langkah-langkah mendesain penjenamaan sekolah:
 1. Merumuskan visi dan misi satuan PAUD.
 2. Mengidentifikasi potensi lingkungan satuan PAUD sebagai sumber pembelajaran.
 3. Mengidentifikasi keunikan (ciri khas), keunggulan, dan kekuatan sekolah yang sudah ada.
 4. Mengidentifikasi persepsi positif masyarakat yang sudah ada terhadap satuan PAUD.
 5. Merumuskan penjenamaan satuan PAUD.
 6. Menentukan nilai-nilai utama karakter yang diprioritaskan dalam penjenamaan sekolah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh satuan PAUD.
 7. Menetapkan penjenamaan satuan PAUD.

- d. Keteladanan kepala satuan PAUD, guru/pendidik, dan tenaga kependidikan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari
 - Kepala satuan PAUD, guru/pendidik dan tenaga kependidikan memberikan keteladanan bagi anak untuk menerapkan nilai-nilai utama PPK
 - Perilaku keteladanan dari figur orang dewasa (Kepala satuan PAUD, guru/pendidik, tenaga kependidikan, orang tua) dapat ditiru secara langsung oleh peserta didik
- e. Memanfaatkan berbagai media seperti poster, spanduk, laman (website), buletin, mading, dan media sosial untuk mengampanyekan gerakan PPK
 - Melakukan sosialisasi PPK kepada pemangku kepentingan pendidikan (guru/pendidik, peserta didik, Komite/Paguyuban Orang Tua/POMG/ paguyuban orang tua, pengawas/penilik, dinas pendidikan, dan masyarakat lainnya) dengan memanfaatkan poster, spanduk, laman, buletin, mading yang mengampanyekan pembiasaan PPK di satuan PAUD misalnya tentang standar operasional prosedur (SOP) misalnya SOP penyambutan anak, SOP pengaturan kegiatan belajar, dan SOP kegiatan makan
- f. Membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi satuan PAUD. Salah satu contoh peraturan yang perlu dibangun adalah peraturan kedisiplinan, peraturan satuan PAUD aman bencana, kesadaran lalu lintas, dan gerakan hijau.
- g. Memberi kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi misalnya literasi digital, bahasa, sains, sosial finansial, dan matematika



Pendekatan PPK Berbasis Keluarga dan Masyarakat

PPK berbasis keluarga dan masyarakat adalah sebuah proses mengembangkan kegiatan pendidikan karakter di satuan PAUD yang melibatkan berbagai macam pelaku di luar satuan PAUD. Pelaku itu dapat berupa individu, lembaga resmi, dan komunitas (lembaga non-formal) serta organisasi yang ada di dalam masyarakat yang dapat menjadi mitra satuan PAUD dalam PPK.

Pendekatan PPK berbasis keluarga dan masyarakat dilakukan dengan:

- a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite/Paguyuban Orang Tua/POMG sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
- b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, komunitas, organisasi, dunia usaha, dan dunia industri; serta
- c. menyinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas kreatif, dan lembaga media massa.

Masyarakat memberikan kontribusi yang besar dalam membantu keluarga maupun pihak satuan PAUD dalam penanaman nilai-nilai (spiritual, moral, estetika) yang mendukung pembentukan karakter. Berbagai kondisi di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap, dan berperilaku warga masyarakatnya. Dengan demikian, para pendidik di lingkup keluarga, satuan PAUD, dan masyarakat perlu melakukan berbagai upaya untuk mendukung anak agar memiliki karakter yang sesuai dengan harapan bangsa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan satuan PAUD untuk mengembangkan karakter anak didik adalah melalui pelibatan dan pemberdayaan berbagai lembaga /komunitas/organisasi seperti lembaga keagamaan, sanggar seni dan budaya, komunitas kreatif, lembaga pemerintahan (misalnya Puskesmas, gelanggang olah raga, polsek, BNN, dinas kesehatan, dinas perlindungan anak, dan BNPPD), dan lembaga penyedia sumber pembelajaran (misalnya perpustakaan, museum, situs budaya, cagar budaya). Dalam hal ini satuan PAUD dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga tersebut, misalnya dalam bentuk pelaksanaan program pembelajaran terkait, kunjungan ke lembaga maupun kegiatan pembuatan materi pembelajaran dalam bentuk cetak maupun non cetak, penyebaran informasi, dan diskusi dengan pihak lembaga untuk menambah wawasan guru dan anak didik. Sebagai contoh, satuan PAUD mendapat kunjungan dari lembaga pemerintah untuk memberikan informasi pada anak didik tentang simulasi penyelamatan diri dari bencana, atau sosialisasi peraturan lalu lintas. Contoh lain adalah satuan PAUD dapat mengembangkan kompetensi personal dan sosial serta minat dan bakat bersama komunitas dan organisasi kreatif (komunitas literasi, dongeng, musik, budaya) serta mengadakan kunjungan ke perpustakaan untuk memfasilitasi anak didik agar memiliki ketertarikan untuk membaca.

4

Pendampingan

- A** Konsep dan Tujuan Pendampingan
- B** Sasaran Pendampingan



A Konsep dan Tujuan Pendampingan

Untuk membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan PPK, pemerintahan perlu menyiapkan pendampingan pada satuan PAUD agar sosialisasi dan diseminasi PPK berjalan dengan lebih cepat dan efektif.

Pendampingan merupakan kegiatan fasilitasi kepada satuan PAUD yang melaksanakan program PPK yang dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang akan ditemui. Tugas pendamping adalah membantu satuan PAUD mencari solusi atas masalah yang ditemui dan mendorong tumbuhnya berbagai inisiatif baru yang berguna pengembangan, kemandirian, dan keberlanjutan PPK.

Tim pendamping program PPK meliputi:

Fasilitator Pusat

Fasilitator pusat terdiri atas unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, praktisi pendidikan, organisasi mitra PAUD, dan akademisi. Fasilitator pusat ini bertanggung jawab dalam mendampingi fasilitator kabupaten/kota di setiap wilayah.

Fasilitator Kabupaten/Kota

Fasilitator kabupaten/kota terdiri atas unsur kepala satuan PAUD, guru, pendidik, organisasi mitra PAUD, Komite/Paguyuban Orang Tua/POMG PAUD yang telah dilatih oleh Fasilitator Pusat. Fasilitator bertanggung jawab untuk mendampingi pelaksanaan PPK di satuan PAUD wilayahnya.

B Sasaran Pendampingan

Sasaran pendamping gerakan PPK adalah guru, pendidik, kepala satuan PAUD, pengawas, penilik, dan Komite/Paguyuban Orang Tua/POMG PAUD.

Pola umum pendampingan dilakukan secara berjenjang dan bertingkat sesuai dengan status satuan PAUD pelaksana PPK. Pola umum pendampingan adalah melalui pelatihan langsung untuk penguatan kapasitas pelaku pendidikan (kepala PAUD, guru, Komite/Paguyuban Orang Tua/POMG PAUD dan pengawas/penilik)

dan pendampingan langsung di satuan PAUD. Pola pendampingan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendampingan Satuan PAUD

Pendampingan satuan PAUD dilakukan secara langsung oleh fasilitator kabupaten/kota. Fasilitator bertanggung jawab memantau dan mendampingi satuan PAUD untuk mengimplementasikan PPK dan mengimbaskan pada satuan PAUD di sekitarnya.

Pendampingan satuan PAUD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. **Sosialisasi**

Kegiatan sosialisasi merupakan pembekalan materi mengenai konsep dasar dan implementasi PPK yang dilakukan oleh satuan PAUD yang telah mendapatkan bimbingan teknis.

b. **Pengembangan Berkelanjutan**

Setelah memperoleh sosialisasi, selanjutnya satuan PAUD melaksanakan PPK di masing-masing lembaga. Pengembangan berkelanjutan di satuan PAUD dapat dilakukan melalui pertemuan rutin kepala/pengelola satuan, guru/pendidik, dan kanal-kanal komunikasi lain yang membantu pelaksanaan PPK.

5

Penilaian dan Evaluasi Program

- A Penilaian PPK**
- B Evaluasi Program**



Program PPK perlu dinilai dan dievaluasi secara terukur dan komprehensif. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan teratur untuk mengetahui tingkat keberhasilan PPK dalam membiasakan perilaku baik peserta didik dan membangun budaya satuan PAUD.

Sementara itu, evaluasi program PPK dilaksanakan oleh Kemendikbud dan/atau pemerintah daerah. Dalam evaluasi ini, kecuali mencari informasi tentang yang terjadi di tingkat satuan pendidikan, komponen-komponen lain yang mendukung dan menghambat keberhasilan PPK juga dikaji. Komponen-komponen lain ini bisa menyangkut sistem dukungan yang lebih luas yang dibangun oleh Kemendikbud.

A Penilaian PPK

Penilaian keberhasilan PPK pada peserta didik dilakukan oleh satuan PAUD sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan berkesinambungan, misalnya per tiga bulan dan enam bulan atau satu semester.

Penilaian di satuan PAUD terkait dengan PPK berbasis kelas, berbasis budaya satuan PAUD, dan berbasis keluarga dan masyarakat dilaksanakan.

Penilaian pada peserta didik diintegrasikan dengan penilaian rutin yang selama ini dilakukan dengan menggunakan skala capaian, catatan anekdot, dan ceklis. Karenanya penilaian PPK di satuan PAUD dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan individu peserta didik berdasarkan enam aspek perkembangan (nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni) serta kompetensi inti dan dasar.

Pihak yang melakukan penilaian adalah pihak internal (kepala satuan PAUD kepala/pengelola satuan PAUD, guru/pendidik, dan Komite/Paguyuban Orang Tua/POMG PAUD) dan pihak eksternal (misalnya akademisi, dinas pendidikan, dan Kemendikbud). Penilaian oleh pihak internal adalah sebagai bagian dari evaluasi program yang mempunyai lingkup yang lebih luas.

Asesmen awal

Dalam penilaian diperlukan informasi tentang kondisi awal satuan PAUD. Untuk itu diperlukan asesmen awal yang datanya bisa menjadi dasar pengembangan program PPK agar sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

Aspek-aspek yang perlu dilihat pada asesmen awal antara lain adalah kondisi yang mendukung dan tidak mendukung implementasi gerakan PPK di satuan PAUD, baik kondisi yang berkaitan dengan anak, guru/pendidik, kepala/pengelola satuan PAUD, dan tenaga kependidikan lain. Termasuk dalam asesmen awal adalah mengidentifikasi potensi dukungan yang diperoleh dari pemangku kepentingan, misalnya dari pemerintah pusat/daerah, perguruan tinggi, perusahaan, komunitas, dan perkumpulan atau organisasi mitra yang ada di masyarakat.

Penilaian PPK berdasar pihak yang menilai

a. Peserta didik oleh guru/pendidik

Pengembangan karakter anak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut dan ditanamkan keluarga di rumah. Anak melihat dan mencontoh tatanan fisik, emosi, dan relasi sosialnya dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari orang tua. Selanjutnya anak tumbuh lebih dewasa dan memasuki lingkungan yang lebih luas seperti satuan PAUD, komunitas, dan masyarakat. Lingkungan ini juga ikut membentuk karakter anak.

Pada anak usia dini, karakter yang dinilai bisa sangat berbeda-beda bergantung usia anak. Sebagai contoh, pada anak usia 0—3 tahun, ketika dia menyerap informasi, yang menurut Montessori tanpa usaha yang disengaja atau disadari (*unconscious absorbent mind*), awal kedisiplinan bisa dinilai dengan mengamati waktu tidur dan makan yang tepat waktu. Anak yang telah distimulus dengan keteraturan akan terbantu di kemudian hari dalam mengelola dirinya lebih baik.

Di usia sekitar 3—6 tahun, anak mulai menyerap informasi dengan sadar (*conscious absorbent mind*) dan mulai mencari pengalaman dan belajar tentang banyak hal seperti urutan, pola, dan bentuk huruf. Anak mulai berlatih menyusun ide dan menyatukan banyak hal dari pengalaman dan memorinya sebagai dasar dalam berinteraksi, mengambil keputusan, dan/atau mengatasi masalah. Penting bagi guru atau pendidik untuk menilai hal tersebut karena kemampuan tersebut akan menyumbang pengembangan karakter ketangguhan, dan kemandirian.

b. Peserta didik oleh orang tua

Orang tua perlu mempunyai pemahaman tentang hal-hal yang perlu mereka nilai terkait bagaimana karakter anak terbentuk. Kematangan koneksi saraf di otak bisa tercermin dari kemunculan karakter seperti disiplin, tangguh,

dan peduli. Dengan pemahaman ini orang tua diharapkan akan memberikan stimulasi di antaranya melalui pembiasaan dan keteladanan bahkan pada anak yang berusia di bawah 2 tahun. Pada usia tersebut koneksi antara area di otak mulai terbentuk terutama pada fungsi kendali yang dimulai dengan mengatur fisik, bertahan hidup, mengendalikan gerak, dan membangun pemahaman melalui pengalaman pancaindra.

Pada usia 2—4 tahun, pembiasaan dalam aktivitas beribadah dan rutinitas sehari-hari (misalnya waktu tidur, mandi, dan makan) sudah bisa dilakukan. Ritme dibangun untuk melatih kendali emosi yang matang. Anak dengan pembiasaan tanpa kendali emosi akan cenderung menunjukkan sikap ego yang berdampak pada perkembangannya di masa yang akan datang.

Pada usia 4—6 tahun, pembiasaan yang sudah dilakukan pada usia 0—4 tahun tersebut dilanjutkan. Selain itu, perlu juga dikembangkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial anak bersama teman bermainnya. Orang tua dapat menilai dengan mengamati perkembangan tersebut dan memberikan stimulasi yang diperlukan pada anak jika kemunculan ritme dan kendali belum terbentuk. Ini sangat penting sebagai bagian dari kesiapan anak bersekolah di jenjang pendidikan dasar.

- c. Guru/pendidik oleh kepala satuan PAUD
Kepala satuan PAUD menilai guru/pendidik dengan mengamati kelengkapan dokumen KTSP dan proses pembelajaran untuk memastikan bahwa nilai-nilai karakter telah diintegrasikan. Selain itu, kepala satuan PAUD juga perlu memastikan bahwa guru/pendidik menjadi teladan dan pembiasaan baik terjadi di kelas.
- d. Kepala satuan PAUD oleh pengawas/penilik
Penilaian pengawas/penilik kepada kepala satuan PAUD dilakukan dengan melihat dokumen satuan PAUD untuk memastikan pengintegrasian nilai-nilai karakter telah dilakukan dalam KTSP, budaya satuan PAUD telah dibangun, dan keluarga serta masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dalam PPK.

B Evaluasi Program

Evaluasi adalah kegiatan mandiri yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mendapatkan informasi tentang tingkat keberhasilan program PPK sebagai masukan untuk peningkatan kualitas PPK pada masa berikutnya. Evaluasi program dilakukan oleh dinas pendidikan kab/kota dan direktorat teknis di lingkungan Kemendikbud yang menyelenggarakan program PPK.

Tujuan dari evaluasi program

- a. Mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengetahui efektivitas program PPK
- b. Mendapatkan informasi tentang capaian PPK
- c. Mendapatkan informasi tentang tantangan dan sistem dukungan yang dibangun dalam pelaksanaan PPK
- d. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan mutu pada pelaksanaan PPK selanjutnya

Pelaksanaan evaluasi program PPK harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Berorientasi pada Proses
Evaluasi dilakukan untuk mengukur kemajuan yang dicapai. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk peningkatan mutu pelaksanaan PPK di satuan PAUD.
- b. Mengacu pada Kriteria Keberhasilan
Evaluasi yang dilaksanakan seharusnya mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria keberhasilan disesuaikan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan PPK
- c. Mengacu pada Asas Manfaat
Evaluasi sudah seharusnya dilaksanakan dengan tidak mencari-cari kesalahan akan tetapi justru mencari solusi yang dapat mempermudah pelaksanaan PPK di satuan PAUD. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi harus berorientasi pada kegunaan dan manfaat yang bisa digunakan satuan PAUD untuk mengelola pelaksanaan PPK di satuan PAUD.
- d. Dilakukan secara Objektif
Evaluasi harus dilaksanakan secara objektif sesuai dengan apa yang terjadi dan hasil temuannya dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Evaluasi program PPK dilakukan melalui observasi (pengamatan langsung), analisis dokumen, survei, wawancara maupun diskusi untuk mengumpulkan data, baik data-data administratif maupun catatan-catatan pendukung untuk menilai sebuah program atau kegiatan. Metode yang digunakan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh dan target dari evaluasi tersebut.

Observasi yang dilakukan meliputi observasi lingkungan fisik satuan PAUD, lingkungan sosial satuan PAUD, dan budaya karakter satuan PAUD. Penilai juga dapat melihat dokumen satuan PAUD yang mendukung penilaian pada lembar observasi.

Analisis dokumen dapat dilakukan pada dokumen regulasi atau kebijakan di tingkat pemerintah pusat, daerah, dan/atau satuan pendidikan. Analisis dokumen ini dilakukan di antaranya untuk melihat konsistensi kebijakan di level lembaga yang berbeda.

Diskusi kelompok terarah atau *focus group discussion* dapat dilakukan dalam mengevaluasi efektivitas program dengan mengundang target dari program tersebut. Metode ini bisa sangat menghemat waktu dan efektif untuk membahas isu-isu tertentu dengan syarat adanya moderator/fasilitator yang mampu menjaga fokus diskusi.

Beberapa dimensi yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi adalah sebagai berikut.

- a. Materi
Materi adalah segala bahan, dokumen atau panduan yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaan program atau kegiatan PPK.
- b. Metode
Metode adalah segala aktivitas dalam kegiatan atau program yang diadakan dalam menyebarluaskan kemampuan atau informasi mengenai Penguatan Pendidikan Karakter.
- c. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pihak yang terlibat dalam aktivitas penyelenggaraan program PPK atau pelaksanaan PPK di satuan PAUD. Terdapat empat aktor yang telah diidentifikasi berkontribusi terhadap suksesnya pelaksanaan program atau kegiatan PPK yaitu dukungan warga satuan PAUD, orang tua, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

d. Kepemimpinan

Kepemimpinan terfokus pada fungsi kepemimpinan yang di dalamnya terdapat kepala/pengelola dan guru/pendidik dalam menggerakkan PPK di satuan PAUD.

e. Sumber Dana

Sumber dana merupakan aspek yang tidak kalah penting dari aspek lainnya. Ketersediaan sumber dana bisa dikatakan merupakan komitmen dalam menyelenggarakan PPK di segala tingkat. Terdapat tiga aspek yang teridentifikasi dalam hal sumber dana, yaitu dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat.

f. Hasil

Hasil merupakan ketercapaian tujuan dari pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter. Ada dua aspek yang masuk dalam komponen hasil yaitu perubahan positif perilaku peserta didik secara individual dan perubahan positif pada budaya satuan PAUD di satuan PAUD.



6

Referensi



Albertus, Doni Koesoema. 2015. *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta: Kanisius.

Asmani, Jamal Ma'mur. 2011. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Satuan PAUD*. Jogjakarta: Diva Press.

Ki Hadjar Dewantara. 1962. *Bagian I Pendidikan*. Jogjakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.

UNESCO. 2015. *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?*. Paris: UNESCO Publishing

Gardner, Howard. 2003. *Kecerdasan Majemuk*. (Terjemahan Drs. Alexander Sindoro). Batam Centre: Interaksara.

Santrock, J. W. 2013. *Life-span Development* 14th ed. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.



Narahubung

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E, Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telepon. (021) 5703151, laman: www.paud.kemdikbud.go.id

Informasi lebih lanjut tentang PAUD dan PPK
dapat diperoleh pada laman:

www.cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id

www.anggunpaud.kemdikbud.go.id